

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Publik	17
1. Pengertian Kebijakan Publik	17
2. Proses Kebijakan Publik.....	19
3. Jenis – jenis Kebijakan Publik.....	22

B.	Tinjauan Umum Tentang Administrasi Pertanahan	24
1.	Arti dan Tujuan Hukum Administrasi	24
2.	Asas-asas Pemerintahan Menurut Sistem Hukum Administrasi Negara Republik Indonesia	29
3.	Teori Kewenangan.....	30
4.	Freies Ermessen.....	32
5.	<i>Good Governance</i>	36
C.	Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah	38
1.	Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	38
2.	Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT.....	41
D.	Tinjauan Umum Tentang Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah	45
1.	Sejarah Blanko dan Perkembangan Akta PPAT	45
2.	Akta PPAT.....	49
3.	Fungsi Akta PPAT.....	50
E.	Tinjauan Umum Tentang Akta otentik	52
1.	Pengertian Akta Otentik	52
2.	Syarat Akta Otentik	54
3.	Nilai Pembuktian Akta Otentik	54
BAB III METODE PENELITIAN		56
A.	Sifat Penelitian.....	56
B.	Jenis Penelitian	57
1.	Penelitian Kepustakaan	57
2.	Penelitian Lapangan	60

C. Alat dan Cara Pengumpulan Data	62
D. Jalannya Penelitian	63
1. Tahap Persiapan.....	64
2. Tahap Pelaksanaan	64
3. Tahap Penyelesaian	64
E. Hambatan dan Cara Penyelesaian.....	65
1. Hambatan.....	65
2. Cara Penyelesaian.....	65
F. Analisis Hasil Penelitian.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Gambaran Umum Kabupaten Merauke	67
1. Letak Geografis Kabupaten Merauke.....	67
2. Luas Wilayah Kabupaten Merauke	67
3. Penduduk dan Pendidikan di Kabupaten Merauke.....	68
4. Perkembangan Hukum Pertanahan Di Kabupaten Merauke	68
5. Sejarah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012	73
B. Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Merauke.....	78
1. Hasil Penelitian.....	78
2. Pembahasan	83
C. Pelaksanaan Pembuatan Akta PPAT Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Merauke	96

1. Hasil Penelitian.....	96
2. Pembahasan	99
D. Akibat Hukum Terhadap Akta PPAT Yang Dibuat Tidak Memenuhi Ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012	105
1. Hasil Penelitian.....	105
2. Pembahasan	109
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123
A. Buku.....	123
B. Undang-Undang.....	125
C. Tesis dan Jurnal	126
D. Internet.....	127